

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR MEI 2012

Minggu-minggu akhir Mei 2012 atau kegiatan DPR awal Masa Persidangan IV tahun sidang 2011-2012, mengangkat Agenda Rapat Paripurna tanggal 16 Mei dan isu strategis yang diambil dari Pidato Pembukaan Masa Sidang IV tanggal 14 Mei. Berikut ringkasannya.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

PARIPURNA TANGGAL 16 MEI

Agenda Rapat Paripurna tanggal 16 Mei, **pertama**, persetujuan Rapat Paripurna atas Hibah 6 (enam) pucuk Meriam *Salute Gun* Kepada Pemerintah Republik Demokratis Timor Leste (RDTL).

Sesuai UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa: *Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.* Atas dasar ketentuan tersebut maka, Komisi I DPR yang ditugasi oleh Bamus membahas masalah ini pada tanggal 15 Mei, dan melaporkan kepada Rapat Paripurna. Hasilnya memutuskan bahwa Hibah 6 (enam) Pucuk Meriam *Salute Gun* kaliber 75 mm termasuk 50 butir amunisinya, dapat disetujui oleh Komisi I untuk dihibahkan kepada Pemerintah RDTL. Hibah ini akan meningkatkan hubungan bilateral RI dan RDTL. Disamping itu, hibah ini akan digunakan dalam rangka menyambut kedatangan Presiden RI pada acara peringatan HUT RDTL ke-10 tanggal 19-20 Mei 2012. Atas hasil rapat Komisi I ini, rapat paripurna telah memberikan persetujuannya.

Agenda kedua: Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2013.

Pada tahun 2013, kinerja global diperkirakan akan lebih baik daripada tahun 2012 dengan tingkat ekspansi mencapai 4,1%. Pertumbuhan ekonomi global 2013 diperkirakan masih akan disumbang terutama oleh *emerging dan developing economies* yang akan tumbuh sebesar 6,0% di tahun 2013.



Meskipun kinerja ekonomi global tahun 2013 diperkirakan akan semakin membaik, namun tetap perlu diwaspadai adanya beberapa tantangan dan potensi resiko di tahun 2013, yang berasal dari faktor ketidakpastian pemulihan kawasan Eropa, potensi perlambatan ekonomi negara-negara maju, dan masih tingginya fluktuasi harga minyak mentah dunia. Sebagai upaya memitigasi sejumlah resiko tersebut, Pemerintah menyiapkan sebuah langkah antisipatif dan instrumen kebijakannya, diantaranya, [1] penguatan dana infrastruktur dan kebutuhan mendesak melalui pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL), [2] penguatan konsumsi domestik dengan didasari

faktor alamiah, bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar, [3] kebijakan pengendalian subsidi BBM dan penghematan anggaran belanja kementerian/lembaga, [4] pelaksanaan optimalisasi pendapatan negara dan peningkatan efektifitas penyerapan belanja negara, dan [5] kebijakan untuk penyediaan dana ketahanan pangan dan pembangunan energi.

Dalam rapat paripurna tersebut, Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa tema Rancangan Kegiatan dan Program Kerja untuk tahun 2013 adalah **“Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”**. Esensi dari tema pembangunan yang diajukan Pemerintah, memberikan tekanan mengenai pentingnya penguatan daya saing perekonomian domestik untuk mendukung pencapaian kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan strategi kebijakan fiskal tahun 2013, agar benar-benar diarahkan untuk mampu merespon dinamika

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI**: Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO**: Eka Hindra Sasmita; Rizka Arinindy **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

perekonomian global, regional maupun domestik, dan memberikan dukungan optimal bagi sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tema arah kebijakan fiskal tahun 2013 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal.

Penyehatan fiskal dilakukan dengan menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), yang ditempuh melalui 4 hal pokok yaitu: (i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja modal untuk memacu belanja modal dan peningkatan daya saing; (iii) menjaga defisit anggaran pada batas aman (dibawah 3% PDB); (iv) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang *managable*.

Melalui keempat langkah tersebut, diharapkan APBN dapat dikelola secara efisien dan produktif sehingga mempunyai kontribusi positif bagi terwujudnya stabilitas ekonomi dan peningkatan daya saing serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

PIDATO PEMBUKAAN 14 MEI

Pidato ketua DPR pada Pembukaan Masa Sidang IV tanggal 14 Mei, antara lain menyinggung: [1] Masalah BBM. Berlarut-larutnya permasalahan BBM sangat berkaitan dengan masalah postur APBN 2012 yang sedang berjalan. Para Anggota Dewan diharapkan terus melakukan pemantauan terkait dengan semakin membesarnya jumlah anggaran subsidi BBM. Langkah yang tepat adalah dilakukannya penghematan dan pengendalian BBM bersubsidi, mengingat subsidi BBM dalam APBN telah disepakati bersama Pemerintah. Dengan demikian, dalam Masa Persidangan IV ini, para Anggota Dewan hendaknya lebih pro-aktif menemukan kebijakan dan menggali ide-ide bersama Pemerintah, guna mencari solusi dalam mempertahankan besaran APBN-Pe-

rubahan 2012 yang telah disepakati, agar ekonomi nasional tetap terjaga dan APBN tetap sehat dan aman. Untuk membahas dan menetapkan solusi yang tepat dan terukur, dan dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan serta rencana aksi, dan kemudian dapat segera diimplementasikan agar ada kepastian di masyarakat.

Dewan dapat memahami permasalahan yang berkembang antara kebutuhan menutup defisit dalam APBN dan potensi penerimaan negara dengan harga BBM tetap, seperti yang berlaku dan tidak mengalami kenaikan. Pimpinan Dewan khawatir, bila kondisi tersebut dibiarkan, dimana subsidi BBM dan listrik meningkat tanpa pengendalian, maka defisit APBN bisa menembus 3,5% diatas angka yang telah ditetapkan dan ini bertentangan dengan undang-undang. Dewan menyadari, tidak banyak opsi yang tersedia dalam memecahkan permasalahan selama ini dan terlalu banyak energi yang dikeluarkan dalam pembahasan. Pemerintah harus bekerja lebih keras mencari, mengolah dan memilih opsi yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat.

Selain itu, Dewan menanggapi positif solusi yang disampaikan Kepala Negara, yakni *Pertama*, kita harus melakukan pengurangan secara signifikan penggunaan volume BBM bersubsidi. *Kedua*, meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara. *Ketiga*, semua jajaran pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga negara, juga harus melakukan penghematan dan efisiensi atas pengeluaran di wilayahnya masing-masing. Dewan berpendapat bahwa ketiga solusi tersebut sangat mungkin dilakukan.

[2] Konflik pertanahan, perkebunan dan pertambangan di berbagai daerah, masih saja terjadi. Masyarakat mengangap kasus-kasus yang terjadi dan memakan korban terkait sengketa tanah adalah dikarenakan adanya "penindasan" antara pemilik modal yang kuat dengan warga masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Banyaknya kasus tanah yang tidak juga terselesaikan membuat Komisi II memutuskan untuk membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan



Konflik Agraria. Pertimbangan lainnya adalah rekomendasi Panitia Kerja Sengketa dan Konflik Pertanahan tak pernah dituntaskan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tim ini akan melibatkan sejumlah Komisi. Tim ini diharapkan dapat mendorong pemerintah menuntaskan persoalan sengketa lahan dan konflik agraria.

[3] Masalah lain yang juga mendapatkan perhatian kalangan Dewan adalah masalah Otonomi Daerah. DPR menghargai dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh peringatan Wakil Presiden dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-16 tanggal 25 April 2012 yang lalu, dimana pelaksanaan Otonomi Daerah masih tumpang tindih antara keputusan pusat dan daerah sehingga perlu ada perbaikan secepatnya oleh semua pihak.

Dewan juga berpandangan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah selama ini masih mengalami keadaan dimana banyak hal yang belum jelas koridornya antara pengelolaan di pusat dan daerah. Kita memang harus jujur untuk mengakui hal itu. Dewan sependapat bahwa sumber penyebab masih tumpang tindihnya desentralisasi pelaksanaan Otonomi Daerah, antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban.

[4] Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 tinggal hitungan bulan lagi. Ada 6 (enam) pasang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bahkan salah satu diantaranya adalah Yang Terhormat Dr. H. Hidayat Nur Wahid anggota Fraksi PKS, Ketua BKSAP. Seperti kita ketahui bersama, ke-enam pasang bakal calon tersebut memiliki kualitas, kapasitas dan kapabilitas yang baik untuk memimpin Ibukota Jakarta. Oleh sebab itu, DPR mengharapkan Pemilukada dapat berjalan dengan aman, tertib, langsung umum bebas dan rahasia (Luber), agar dapat menjadi contoh yang baik bagi pelaksanaan Pemilukada di daerah lainnya. Kesuksesan Pemilukada DKI akan menjadi barometer bagi Pemilukada di daerah lain.

[5] Hari Buruh 1 Mei yang baru lalu telah diperingati oleh seluruh buruh di berbagai kota di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Peringatan yang sempat mengundang kekawatiran masyarakat akan terjadi tindak anarkis, ternyata tidak terbukti. Alhamdulillah aksi buruh berjalan dengan tertib dan damai. Perjuangan para buruh yang disuarakan melalui pimpinan organisasi mereka, sangat patut kita dengar, kita perhatikan dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah. Isu yang diusung sejauh ini tidak beranjak dari tuntutan dipenuhi hak-hak normatif mereka seperti perbaikan upah, kesejahteraan, jaminan sosial, kesehatan dan perlindungan. Membaiknya jaminan berserikat dan konsolidasi pergerakan buruh, diharapkan akan berhasil membawa perubahan termasuk reformasi sistem pengupahan dan jaminan sosial.

Demikian pula dengan buruh migran. Buruh migran saat ini berada dalam posisi yang rentan, bekerja di negara lain yang sering tidak memperoleh perlindungan yang layak.

Kita baru saja menyelesaikan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. RUU ini harus segera menjadi UU karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan pekerja migran. Yang terakhir adalah kasus penembakan tiga orang TKI asal Nusa Tenggara Barat oleh Polisi Diraja Malaysia, yang sangat menyentuh nurani kita. Dewan meminta agar kasus ini ditindak lanjuti segera melalui investigasi secara tuntas dan melalui jalur diplomatik, agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari. Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan konvensi ini dalam rangka mendorong penerapan prinsip-prinsip serta norma standar Internasional bagi perlindungan hak buruh seluruh pekerja migran dan keluarganya. Salah satu pasal dalam konvensi ini menegaskan bahwa *“tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat pekerja migran”*. Dalam konvensi ini juga diatur *bahwa pekerja migran dan keluarganya harus memiliki hak untuk meminta perlindungan pejabat konsuler atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara tersebut, sehingga semua negara harus meratifikasi konvensi dan mematuhi*.

KUNJUNGAN KEHORMATAN PRESIDEN PRESIDUM MAJELIS RAKYAT TERTINGGI KOREA UTARA

Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Kunjungan Kehormatan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara Y.M Kim Yong Nam, di Gedung DPR-RI, Selasa 15 Mei 2012. DPR-RI mengharapkan situasi Semenanjung Korea tenang dan tidak bergejolak dan diharapkan semua pihak ikut berkontribusi menciptakan situasi kawasan yang damai. Harapan tersebut dapat diwujudkan dengan tidak saling menunjukkan kekuatan secara militer, termasuk meluncurkan roket yang terjadi beberapa waktu lalu, walaupun sudah ada himbauan dari dunia internasional.

Pertemuan antara Ketua DPR dan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara diharapkan memberikan dorongan kepada Korea Utara, dan kita semua, agar dapat menahan diri dan memberi dampak kepada kawasan lainnya, termasuk Asia Tenggara bahkan dunia. Ketua DPR mengharapkan, kalau ada keinginan dari masyarakat Korea untuk menyatukan Utara dan Selatan, harus diwujudkan, karena pada dasarnya, mereka itu bersaudara. Kalau ada keinginan masyarakat Korea untuk bersatu tentunya bisa dilakukan dengan proses yang baik, proses damai dengan mendengarkan suara rakyat.

Dalam pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara itu, Kim Yong Nam tetap mengharapkan Indonesia dapat memahami posisi Korea Utara, bahkan ia mengundang Ketua DPR-RI untuk berkunjung ke Korea Utara.*

Menhut Diminta Tidak Berikan Ijin Perluasan kepada 13 Perusahaan Tambang

Komisi IV DPR mendesak Pemerintah c.q Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk segera bertindak terkait pinjam pakai kawasan hutan atas 13 perusahaan tambang yang belum mendapat ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.



Suasana rapat Komisi IV DPR RI

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzyi pada saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV dengan Dirjen Planologi Bambang Soepijanto, rapat tersebut dilakukan di ruang rapat Komisi IV DPR Senayan Jakarta, Rabu (23/5) sore.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzyi meminta, Pemerintah c.q Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi, dan segera menyelesaikan tahapan penetapan kawasan hutan sesuai dengan amanat UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, terutama untuk kawasan hutan didaerah yang telah melakukan alih fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRWP yang sudah mendapat persetujuan DPR.

Romy mengatakan, Komisi IV DPR akan segera membentuk Tim untuk

melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka fungsi pengawasan terkait kegiatan pertambangan dan kegiatan lain diluar kegiatan kehutanan yang beroperasi di dalam kawasan hutan antara lain area konsesi PT Chevron Pacific Indonesia.

Dia juga meminta, agar Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan untuk melakukan pemantapan kawasan hutan dengan tata batas yang jelas di areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman (IUPHHK-HA dan HT) secara nasional.

Selanjutnya, Komisi IV DPR juga meminta kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan untuk segera memberikan data-data (dalam bentuk matrik), seperti data lokasi, luas areal dan masa berlakunya SK

Menhut, data perusahaan yang memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan, serta data perusahaan yang berada di kawasan hutan, yang berubah perusahaannya menjadi areal penggunaan lain, data-data tersebut segera diserahkan kepada Komisi IV DPR secepatnya.

Sementara itu Dirjen Planologi Bambang Soepijanto mengemukakan, sampai saat ini memang belum ada permohonan ijin perluasan dari ke-13 perusahaan tambang tersebut.

Pada kesempatan itu, Bambang menyambut baik dan mendukung pembentukan Panitia Kerja Pengelolaan Kawasan hutan, karena dengan adanya Panja tersebut, diharapkan terwujud mekanisme kontrol dan penyelesaian masalah kehutanan secara lebih efektif dan efisien. (Spy). foto: parle

FUI Minta Komisi III Kuatkan Polri Tolak Konser Lady Gaga

Forum Umat Islam – FUI yang merupakan gabungan ormas Islam menyampaikan aspirasinya menolak pelaksanaan konser penyanyi Lady Gaga di Indonesia. Mereka menyebut artis asal Amerika ini mengkampanyekan kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur NKRI.

“FUI ingin meluruskan tidak benar persepsi yang berkembang bahwa yang menolak Lady Gaga hanya FPI,” jelas M. Al Khaththath Sekjen FUI dalam RDPU dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/12). Ia menyebut beberapa ormas pendukung FUI seperti Dewan Masjid Indonesia, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, FBR dan lain-lain.

Pada bagian lain Sekjen FUI menambahkan telah mendapat informasi bahwa Polri ditekan oleh pihak-pihak baik di dalam maupun dari luar negeri untuk mengizinkan konser Lady Gaga. Itulah sebabnya ormas Islam datang ke DPR untuk meyakinkan Komisi III agar menguatkan Polri tetap pada putusan tidak memberi izin konser artis yang disebutnya masuk kelompok

pemuja setan.

“Komisi III perlu menguatkan Polri agar menolak Lady Gaga. Untuk lebih meyakinkan FUI siap mengerahkan sejuta umat melakukan unjuk rasa,” tegasnya.

Sementara itu Ketua FPI Munarman yang hadir dalam pertemuan tersebut mengingatkan agar aparat tidak mempercayai janji promotor akan menampilkan Lady Gaga sesuai dengan budaya di Indonesia. “Sudah terbukti dalam konser di Filipina artis ini ingkar janji untuk tidak tampil vulgar. Ia bahkan di panggung mengatakan saya tidak bisa diatur pemerintah anda.”

Pimpinan sidang Nasir Djamil yang juga Wakil Ketua Komisi III menyatakan dapat menerima aspirasi yang disampaikan oleh FUI. “Kita akan sampaikan pada rapat kerja dengan Kapolri yang

akan dilaksanakan minggu depan,” ujarnya.

Beberapa juru bicara fraksi yang hadir dalam RDPU tersebut menyuarakan dukungan untuk menolak konser Lady Gaga. Fraksi tersebut adalah FPPP, FPKS dan FPAN. “Segala yang mengumbar erotisme, vulgar tidak boleh hadir di negeri ini, baik itu dari luar negeri maupun dalam. Kita tidak mau negeri ini jadi keranjang sampah mulai dari limbah B3 sampai budaya yang tidak sesuai,” tandas Ahmad Yani dari FP3.

Ia juga meminta pihak kepolisian memeriksa promotor pertunjukan yang sudah berani menjual tiket pertunjukan sebelum mendapat izin. Tindakan ini jelas merugikan konsumen. (iky) foto:wy/parle



Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil (kanan) saat berbincang dengan perwakilan FUI (kiri)

Ketua DPR Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Singapura

Enam anggota Parlemen Singapura dipimpin Ketua-nya Michael Palmer melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (22/5), Ketua DPR menyatakan hubungan kedua negara sejauh ini telah berjalan dengan baik.

Namun, lanjutnya, untuk meningkatkan kerjasama itu hendaknya dilakukan evaluasi terus menerus terutama terhadap beberapa isu yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Ia berharap Parlemen Singapura memberi dukungan kepada pemerintahnya terhadap 4 isu penting yaitu masalah perbatasan dua negara, ekstradisi, kejahatan perdagangan manusia termasuk narkoba dan pencucian uang.

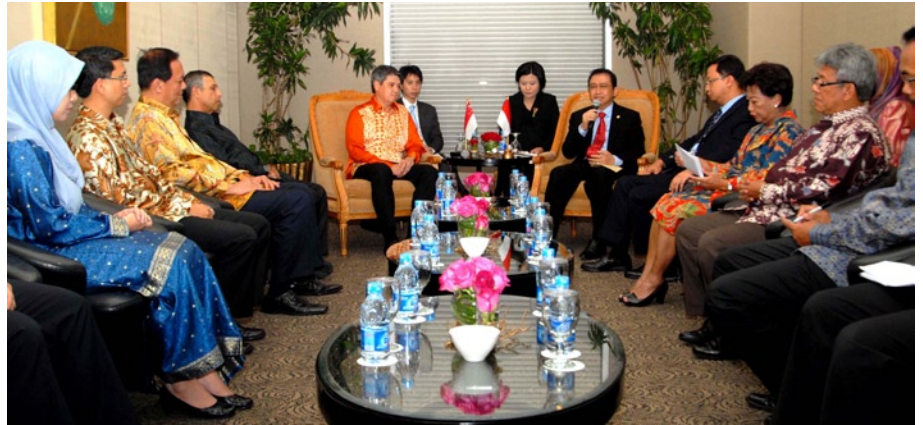
“Masalah tersebut penting untuk diselesaikan agar hubungan yang sudah terjalin baik dapat ditingkatkan, membangun hubungan emosional yang lebih baik lagi dalam mendekatkan rakyat Singapura dengan rakyat Indonesia,” jelas Marzuki.

Menjawab hal ini Michael Palmer menjelaskan posisi negaranya terkait perjanjian ekstradisi masih berdasarkan kesepakatan pada tahun 2007. Namun ia menyatakan beberapa permasalahan hukum sejauh ini dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum internasional yang ada.

Speaker Parlemen Singapura ini menegaskan posisi negaranya terhadap kejahatan perdagangan manusia. “Zero tolerance untuk kejahatan human trafficking terutama pada wanita dan anak-anak,” tegasnya.

Palmer menambahkan baru saja diangkat sebagai Ketua Parlemen pada akhir tahun 2011 lalu. Kunjungan muhibah ke luar negeri kali ini merupakan yang pertama kali. Ia sengaja memilih Indonesia untuk menunjukkan betapa pentingnya negara tetangga yang berbatasan dengan Selat Malaka ini.

Untuk lebih meningkatkan kesepahaman antara parlemen kedua negara ia secara resmi mengundang Ketua DPR Marzuki Alie untuk berkunjung ke Singapura.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima enam anggota Parlemen Singapura di Hotel Mulia, Jakarta



Ketua DPR RI Marzuki Alie (kanan) saat menerima enam anggota Parlemen Singapura yang dipimpin Ketua-nya Michael Palmer di Hotel Mulia, Jakarta

Dukungan Bahasa Resmi Kedua AIPA

Ketua DPR dalam kesempatan tersebut meminta parlemen Singapura mendukung usulan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua Organisasi Parlemen Negara-negara Asean – AIPA.

“Saya rasa baik untuk membangun satu kebanggaan Asean. Bukan karena Bahasa Indonesia atau Melayu berasal dari Malaysia dan Indonesia tetapi karena bahasa ini banyak digunakan di

negara-negara Asean. Langkah menetapkan bahasa resmi kedua ini bagus untuk mewujudkan *Communitas Asean 2015*,” imbuhnya.

Ketua Parlemen Singapura menyatakan menyambut baik usulan Indonesia tersebut. Ia berjanji segera mendiskusikannya secara internal. “Kita akan jawab nanti pada saat pelaksanaan Sidang Umum AIPA di Lombok bulan September 2012 yang akan datang,” demikian Palmer. (iky)foto: wy/parle

DPR Akan Bentuk GKSB DPR-Argentina

DPR akan segera membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara parlemen Indonesia dan parlemen Argentina. Pasalnya, kerjasama antar Parlemen kedua Negara telah terjalin erat dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) apalagi hubungan bilateral kedua negara telah terbangun sejak tahun 1956.

Hal itu mengemuka saat pertemuan Wakil ketua BKSAP DPR RI Andi Anzhar Cakra Wijaya (F-PAN) didampingi anggota BKSAP Harbiah Salahuddin (F-PG) dengan delegasi parlemen Argentina yang dipimpin oleh Julia Perie di ruang pertemuan BKSAP, Selasa (22/5).

Menyinggung kerjasama di bidang perdagangan, Andi Anzhar menegaskan hubungan Indonesia dan Argentina belum mencerminkan peningkatan potensi kerjasama antar kedua Negara. "Dalam lima tahun terakhir surplus tetap berada di pihak Argentina. Defisit bagi Indonesia antara lain karena hambatan non-tarif, karena Argen-



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Andi Anzhar Cakra Wijaya (kiri) dan Anggota BKSAP Harbiah Salahuddin (kanan)



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Andi Anzhar Cakra Wijaya saat memberikan cinderamata kepada Delegasi Argentina

tina, memberlakukan anti dumping, safeguard measures, tuduhan under invoice dan kewajiban menggunakan bahasa Spanyol,"katanya. Artinya jika terjadi permasalahan dalam perdagangan akan kesulitan berkomunikasi disisi lain, Argentina juga masih terkonsentrasi pada mitra dagang tradisional yaitu Negara-negara Amerika Latin,

Amerika Serikat, China dan Uni Eropa.

Andi anzhar mengajak parlemen Argentina untuk bersama-sama menyuarakan bahwa Islam bukanlah musuh demokrasi, justru masyarakat muslim sangat menginginkan adanya demokrasi, seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya Suriah dan Yaman

Hal senada disampaikan oleh Julia,

dia mengatakan persahabatan kedua negara sangat penting untuk ditingkatkan diberbagai bidang. Dan saat pertemuan itu, dia menyampaikan bahwa Presiden Argentina ingin berkunjung ke Indonesia.

Sebelumnya, Senator Argentina ini telah mengunjungi Provinsi Bali dan menawarkan program kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Badung berupa pembentukan kota kembar yang difokuskan pada kerja sama di bidang perdagangan dan pariwisata serta pendidikan.

Duta Besar Indonesia untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay Nurmala Kartini Sjahir yang juga hadir mendampingi delegasi Argentina, mengatakan, Argentina mempunyai sistem Koperasi yang bagus. Bidang agraris Pertanian dan peternakan dalam naungan Koperasi terbukti efektif menghasilkan keuntungan bagi semua pihak. Ini yang bias dijadikan pelajaran bagi Indonesia yang juga merupakan Negara agraris. (ry) foto:ry/parle

Kunjungan DPR Ke Portugal Bukan Kunjungan Gelap

Dubes RI di Lisabon Albert Matondang mengatakan, kunjungan DPR RI ke Portugal yang terdiri dari 9 anggota dari berbagai Parpol di DPR yang dimulai tanggal 13-17 Mei 2012 merupakan kunjungan kerja yang bermanfaat dan bukan merupakan kunjungan gelap seperti yang dinilai PPI Portugal.

“Kunjungan itu sudah lama dipersiapkan dan diatur bersama mitra GKSB DPR RI di Parlemen dan Pemerintah Portugal,” ujar Albert dalam siaran pers yang diterima oleh Parle, Kamis, (24/5).

Selama di Lisabon, Portugal, terang Albert, GKSB DPR RI bertemu dengan Kelompok Persahabatan Parlemen Portugis-Indonesia di Parlemen Portugal, Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen, Ketua Parlemen, dan Menteri Luar Negeri Portugal. Rombongan juga diacarakan bertemu dengan Walikota Lisabon. “disamping itu rombongan GKSB DPR RI telah mengunjungi industri strategis OGMA, EDP dan AICEP, kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat kemajuan industri dirgantara dan tekonolgi energi terbarukan yang dikembangkan OGMA dan EDP,” paparnya.

Menurutnya, rencana kunjungan sama sekali tidak ditutup-tutupi dan malah sejak tiba di Lisabon, mereka langsung dipertemukan dengan masyarakat Indonesia yang berdiam di

Lisabon termasuk anggota PPI Portugal di Lisabon. “ada 3 anggota PPI Portugal di Lisabon yang menghadiri acara ramah tamah dengan GKSB DPR RI tanggal 13 Mei 2012 dan hanya 3 orang yang tidak dapat hadir karena kesibukan menyelesaikan tugas belanjarnya,” katanya.

Dia menambahkan, KBRI selalu senantiasa melibatkan komponen masyarakat Indonesia dan khususnya PPI dalam acara-acara KBRI. “Hal itu bukan hanya dimaksudkan untuk transparansi, tapi sekaligus dimasukkan menjalin tali silaturahmi diantara sesama komponen bangsa,” Tandasnya.

Selama acara ramah-tamah berlangsung 2 jam lebih, rombongan GKSB DPR RI berbicara dengan baik dengan ketiga anggota PPI Portugal. “Pada saat itu tidak ada hal-hal yang mereka tutup-tutupi. bahkan salah seorang dari anggota PPI Aziiz Sutrisno yang belajar Teknik Lingkungan di Universitas Nova Lisboa memohon untuk ikut dalam peninjauan GKSB DPR RI ke industri strategis OGMA, EDP,

dan AICEP,”ujarnya. Alasannya untuk ikut peninjauan adalah untuk keperluan studinya, permohonan disetujui berdasarkan asas itikad baik dalam rangka membantu kegiatan belajar anggota PPI dan sama sekali tidak dimasukkan untuk kepentingan lain.

Albert menilai kunjungan GKSB DPR RI ke Portugal relevan dan bermanfaat dalam membantu melengkapi upaya pemerintah memajukan hubungan bilateral dengan Portugal. “KBRI akan terus membina hubungan dengan segenap komponen masyarakat Indonesia yang ada di Portugal termasuk dengan Pengurus PPI Portugal meskipun jumlah anggota PPI di Portugal baru 20 orang,” katanya. (si)foto:parle



Gedung Parlemen Portugal, Lisbon Portugal (www.flickr.com)

RUU Pemda Dukung Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DPR segera menyusun revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk menggantikan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Dasalnya, selama pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara empirik masih dirasakan adanya beberapa permasalahan yang kalau dibiarkan akan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemda Ibnu Munzir saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulut MM. Onibala, di Ruang Mapaluse, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (22/5).

Pansus RUU tentang Pemda saat ini, lanjutnya, terus mencari masukan-masukan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulut. "Masukan-masukan tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat kerja antara Pansus RUU tentang Pemda dengan menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya RUU tentang Pemda," katanya.

Menurutnya, sejak reformasi kita telah dua kali membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu, UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah. Kemudian terakhir UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "RUU tersebut merupakan usul inisiatif pemerintah," jelasnya.

Dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004, kata Ibnu, maka dilakukan penataan pembagian urusan pemerintahan yang semakin jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Seperti diketahui, lanjutnya, UU No.32 Tahun 2004 menerapkan konsep urusan secara konkuren antara pusat,



Ketua Tim Pansus RUU Pemda Ibnu Munzir (kanan) memberikan kata pengantar saat pertemuan dengan Gubernur Prov Sulut yang diwakili Wakil Gubernur Prov Sulut Djouhari Kansil

provinsi dan kabupaten/kota. "Jadi setiap urusan dibagi berdasarkan kriteria tersebut melahirkan urusan yang ditangani oleh pihak pusat, provinsi, dan kabupten/kota," tambahnya.

Terkait dengan masalah penangan urusan pemerintahan, Ibnu menjelaskan, bahwa UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda juga telah mendorong lahirnya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada), baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Ibnu, beralihnya proses pilkada dari semula menjadi kewenangan DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat menyebabkan beralihnya pertanggungjawaban kepala daerah pula yang tadinya kepada DPRD menjadi kepada rakyat. Konsep laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD menjadi konsep laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. "LKPJ bukan menjadi instrument untuk melakukan politik

impeachment tetapi lebih berfungsi sebagai semacam progress report kepala daerah kepada DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah," tuturnya.

Lebih jauh Ibnu Munzir mengatakan, setelah memasuki kurun waktu lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan pembenahan dalam penyediaan pelayanan public. "Khususnya yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar yang masih belum menunjukkan pencapaian signifikan dari standar pelayanan minimal (SPM)," ujarnya.

Dia menambahkan, fenomena sosial ekonomi empiris menunjukkan bahwa aspek politik yang berkembang sangat dinamis belum berjalan simetris dengan pencapaian aspek kesejahteraan rakyat. Sehingga muncul anggapan bahwa otonomi daerah belum mampu memberikan proses pelayanan public secara maksimal dan sebaliknya justru kadangkala membawa masalah ter-

jadinya inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

“Pemerintah dalam konteks ini membagi materi muatan yang terkait proses pemerintahan daerah nantinya ke dalam tiga hal, yaitu UU tentang Pemda, UU tentang Desa, dan UU ten-

g Pilkada,” tuturnya.

Tim Pansus RUU Pemda ke Provinsi Sulut terdiri dari 9 orang anggota, dipimpin Ketua Tim Pansus Pemda Ibnu Munzir dari F-PG didampingi sejumlah anggota Pansus lintas fraksi, yakni Nanang Samodra dan Eddy Sadeli dari

F-PD; Ali Wongso Halomoan Sinaga dan Taufiq Hidayat dari F-PG; Hermanto dari F-PKS; AW. Thalib dari F-PPP; Baharuddin Nasori dari F-PKB; dan Mestariyani Habie dari F-Partai Gerindra.(iw)/foto: iwan armanias/parle.

BK Minta Pakar Uji Keaslian Video Mesum Diduga Anggota DPR

Badan Kehormatan DPR RI segera bertindak menjawab keprihatinan publik terkait beredarnya video mesum yang pelakunya diduga anggota DPR. Langkah awal adalah meminta pendapat beberapa pakar teknologi informasi untuk mengungkap keaslian video yang pertama kali beredar di dunia maya tersebut.

“Iya Badan Kehormatan DPR segera bekerja mengundang 2 pakar IT. Kita serahkan data video yang kita peroleh untuk diperiksa keasliannya,” jelas Ketua BK, M. Prakosa kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/12).

Namun mengacu pada tata beracara, ia menolak menyebutkan siapa saja pakar yang dimintai keterangan

serta pendapat yang telah disampaikan. Politisi PDIP ini hanya menyebut telaahan yang diperoleh dari 2 pakar ini dinilai belum cukup sehingga diperlukan mengundang pakar tambahan.

“Pakar belum dapat menyimpulkan video tersebut asli, yang bisa dipastikan adalah ada unsur editing dari beberapa bagian rekaman tersebut. Kita harap minggu ini dapat selesai

pengujiannya” imbuhnya.

Ia menambahkan segera setelah video tersebut bisa dipastikan keasliannya barulah anggota DPR terduga dipanggil untuk meminta keterangan. Prakosa meminta publik bersabar dan mempercayai BK dapat mengungkap kasus ini hingga tuntas. “BK berkepentingan untuk menjaga kehormatan lembaga ini.” (iky) foto:wy/parle



Ketua BK, M. Prakosa saat memberi keterangan kepada wartawan mengenai uji keaslian video mesum yang diduga anggota DPR

RUU Pemda: Bahas 22 Isu Strategis Terkait Pemerintahan Daerah

Ketua Tim Pansus RUU tentang Pemda, Ibnu Munzir mengatakan RUU Pemda secara substansi terdapat 22 (dua puluh dua) isu strategis yang teridentifikasi dan memerlukan pemikiran mendalam bagi kita semua untuk didiskusikan.



Ketua Tim Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah, Ibnu Munzir

“Dari indentifikasi 22 isu strategis tersebut ada beberapa perubahan yang ditawarkan dalam RUU ini yang sifatnya fundamental, disamping ada yang bersifat pengaturan lebih lanjut untuk menciptakan kejelasan dan ketegasan khususnya di tatanan pelaksanaan nantinya. Bahkan RUU menampilkan isu-isu baru yang diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonominya,” jelas Ibnu saat pertemuan dengan DPRD, Walikota dan Bupati se Provinsi Sulut beserta jajarannya, di Ruang Mapaluse, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (22/5).

Menurutnya, perubahan-perubahan yang memerlukan pengaturan untuk memberikan penjelasan bagi Pemda dalam melaksanakan otonomi, antara lain adalah menyangkut isu peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kecamatan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 huruf 1 draft RUU, yaitu kewenangannya untuk memberikan persetujuan rancangan Perda tentang pembentukan kecamatan.

Ibnu menambahkan, RUU Pemda

juga menawarkan perubahan-perubahan tertentu tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarakat antar Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Kawasan Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Terkait dengan masalah isu Pilkada dan isu Desa, Ibnu Munzir menjelaskan, RUU Pemda hanya memuat pengaturan-pengaturannya secara umum semata dan merupakan pengantar, sedangkan pengaturan lebih lanjut secara rinci masing-masing akan diatur dalam UU tentang Pilkada dan UU tentang Desa.

Isu baru yang diatur dalam RUU Pemda ini adalah mengenai daerah berciri kepulauan, inovasi daerah, dan tindakan hukum terhadap aparatur daerah. Isu-isu tersebut sengaja dibuat pengaturannya mengingat urgensi yang sedang berkembang dalam pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama ini.

Begitu juga dengan isu tindakan hukum bagi aparatur daerah, RUU

Pemda memandang bahwa terjadi fenomena di tataran empiris kesan keengganan pejabat daerah untuk menduduki jabatan sebagai pengelola proyek daerah.

“Kesan tersebut diwarnai tuduhan pelanggaran pidana untuk hal-hal yang sebenarnya lebih bersifat administrative. Sehingga dianggap perlu adanya kepastian hukum dalam landasan bertindak bagi pejabat daerah dalam mengelola proyek-proyek pembangunan yang justru kegiatan itu diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah,” ujarnya.

Beberapa isu krusial dalam RUU Pemda ini yang memerlukan pendalaman pemikiran lebih lanjut adalah berkenaan antara lain isu pembentukan daerah baru. Apalagi disini, isu pembentukan daerah baru berkaitan dengan masalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menempatkan daerah otonomi baru sebagai pembagi, dan kalau tidak dikendalikan perkembangannya maka akan terjadi penurunan DAU bagi daerah-daerah lainnya, yang justru sebagian besar dana dalam APBD-nya sangat tergantung kepada DAU. Relasi isu pembentukan daerah otonomi baru dan DAU sangat penting untuk dicatat, mengingat proses pemekaran daerah masih berkembang kuat desaknya hingga sekarang ini.

Ibnu menambahkan, isu lainnya adalah mengenai inovasi daerah, dan sehubungan ini diperlukan pengaturan secara spesifik diskresi yang diambil pejabat pemerintahan dalam melakukan inovasi pelayanan publik. “Hal mendasar dari isu ini adalah tindakan pejabat publik dimaksud selama tidak menimbulkan kerugian negara, tidak mengandug konflik kepentingan, dan bertujuan memenuhi kepentingan umum,” jelasnya.(iw)/foto:iwan armianas/parle.

Komisi III DPR Terima 20 Orang DPRD Morotai

Komisi III DPR RI menerima pengaduan 20 orang anggota DPRD Pulau Morotai. Mereka melaporkan kebijakan Kapolda Maluku Utara yang dinilai terlalu memihak PT. MMC. Bahkan, upaya aparat Pemkab menindak PT. MMC yang menguasai lahan secara ilegal malah berbuah penangkapan oleh aparat kepolisian.

“Kapolda bahkan memberlakukan aparat Pemkab seperti teroris, ditangkap dan diborgol pukul 1 dinihari oleh 20 anggota Brimob bersenjata lengkap,” kata Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, Adjan Djaguna dalam RDPD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/12).

Ia menambahkan kehadiran PT MMC di Kabupaten pemekaran Pulau Morotai untuk melakukan investasi budi daya ikan kerapu dan mutiara. Izin diberikan oleh Pemkab induk Halmahera Utara tahun 2006 pada lahan seluas 4,5 hektar tetapi di lapangan pihak perusahaan memperluas sendiri tanpa izin sampai 10 hektar.

Pemkab sudah melayangkan surat pemanggilan pimpinan PT. MMC beberapa kali tetapi tidak pernah digubris. Sesuai perda tindakan selanjutnya adalah Satpol PP melakukan penindakan dan penyitaan di lahan ilegal tersebut. Pihak PT. MMC tidak menerima langkah Pemkab tersebut dan melaporkan ke Polda Malut.

“Pemkab dilaporkan melakukan penjarahan dan pengrusakan terhadap aset PT. MMC, ini di-follow up oleh Kapolda Malut. Sampai hari ini sudah 15 orang termasuk Kepala Dinas ditahan di Polda. Sementara disisi lain laporan Pemkab tentang pelanggaran yang dilakukan PT MMC tidak ditindaklanjuti. Kepolisian adalah alat negara seharusnya saling bersinergi melakukan perbaikan pada negara ini,” lanjutnya.

DPRD Pulau Morotai berharap Komisi III DPR segera memanggil Kapolri untuk memerintahkan Kapolda membebaskan 15 aparat Pemkab yang ditahan di Polda Malut. Kapolri diharapkan dapat meminta jajarannya memanggil pimpinan PT. MMC yang jelas melanggar aturan, memperluas investasi tanpa izin. “Kami mempertanyakan kenapa pimpinan perusa-

haan ini tidak pernah disentuh aparat hukum,”ujarnya.

Menanggapi hal itu anggota Komisi III dari FPD Edi Ramli Sitanggang menyatakan apa yang dilakukan PT MMC berusaha diluar tempat yang telah diizinkan, dan itu merupakan tindak

kriminalisasi terhadap aparat Pemkab. Ia mengusulkan Komisi Hukum segera melakukan sidak ke Pulau Morotai untuk mengetahui kondisi sebenarnya. “Ini harus jadi atensi kita, apalagi para pejabat diperlakukan seperti teroris ditangkap tengah malam oleh pasu-



Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil

pidana. Dia menduga pasti ada yang salah apabila kondisi ini dibiarkan dan aparat hukum tidak bertindak. “Ini menyangkut kepercayaan terhadap hukum, salah membiarkan pemerintah dan DPRD tidak berdaya. Apa yang dilakukan Kapolda Malut tidak patut, sudah sepatutnya diganti,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi III dari FPPPAhmad Yanimenilai kasus ini sebagai arogansi pemilik modal, didukung aparat kepolisian dengan melakukan

kan Brimob,” tandasnya.

Pimpinan sidang Nasir Djamil menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan kolega sesama wakil rakyat dari DPRD Pulau Morotai. Ia mendukung apabila dipandang perlu melakukan sidak tentu setelah mendapat persetujuan pimpinan DPR. “Yang pasti masukan ini akan kita sampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri yang dijadwalkan minggu depan,” demikian Nasir. (iky) foto wy/parle

GKSB DPR RI Kunker ke Kanada 28 Mei Mendatang

Ketua Tim delegasi GKSB ke Kanada Nurul Iman Mustofa mengatakan, GKSB DPR RI-Parlemen Kanada akan mengadakan kunjungan bilateral ke Kanada yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei-3 Juni 2012 mendatang.



Ketua Tim Delegasi GKSB ke Kanada Nurul Iman Mustofa

“Untuk kunjungan GKSB ke Parlemen Kanada ditetapkan berdasarkan keputusan Rapim BKSAP DPR RI tanggal 6 Februari lalu tentang rencana pengiriman delegasi GKSB DPR RI,” ujar Nurul Iman kepada parle baru-baru ini.

Menurutnya, tujuan kunjungan de-

legasi GKSB DPR RI-Parlemen Kanada yaitu untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua parlemen, mendorong peningkatan kerjasama yang sudah terjalin serta menindak lanjuti pending matters melalui diplomasi parlemen. “Kita juga ingin meningkatkan kerjasama kedua parlemen dalam

berbagai forum internasional serta evaluasi MOU GKSB DPR RI-Parlemen Kanada yang ditandatangani pada tahun 2009,” paparnya.

Disisi lain, lanjutnya, tim juga ingin mengembangkan hal-hal strategik untuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam bidang investasi, perdagangan, kesehatan, pendidikan serta kerjasama pembangunan dan demokrasi. “agenda Tim disana akan bertemu dengan Ketua Parlemen Kanada, Kelompok Persahabatan Parlemen Kanada-Indonesia (CIPFG), Standing Committee of Foreign affairs and international development, pertemuan dengan CIDA, Kadin Kanada, dan lembaga atau departemen yang membidangi energi, serta departemen yang membidangi pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender,” ujarnya.

Delegasi GKSB DPR RI Parlemen Kanada yang berangkat berjumlah 9 orang termasuk Ketua GKSB DPR RI Parlemen Kanada dan didampingi oleh dua sekretariat, 2 orang dari FPD, 3 Orang FPG, 1 orang FPDIP, dan 1 orang dari FPKB, 1 orang dari FPKS dan 1 orang dari Hanura. “untuk biaya kunjungan delegasi GKSB DPR RI Parlemen Kanada menggunakan APBN DIPA tahun anggaran 2012 yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” papar Nurul.

Dia menambahkan, setelah pelaksanaan kunjungan nanti GKSB DPR RI Parlemen Kanada akan menyusun laporan hasil kunjungan paling lambat 2 minggu setelah kepulangan delegasi. “Laporan hasil kunjungan tersebut akan disampaikan kepada instansi atau pihak-pihak terkait, jika diperlukan GKSB DPR RI Parlemen Kanada akan melakukan pertemuan secara intensif dengan instansi terkait. (si)foto:parle

Baleg Minta Masukan PMI, BNPB, Basarnas Terkait RUU Lambang Palang Merah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang Ketua PMI Jusuf Kalla, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Lambang palang Merah.

Dalam rapat dengar pendapat umum, Selasa 22/5, yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah mengatakan, RUU tentang Lambang Palang Merah merupakan salah satu RUU yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012.

Anna mengatakan, RUU ini sudah sangat diperlukan mengingat untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang menggunakan lambang palang merah sebagai tanda pelindung dan tanda pengenalan.

Selain itu sebagai tindak lanjut telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan UU No. 50 Tahun 1958 yang mengatur tentang keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional.

Selama ini, kata Anna, pengaturan mengenai lambang palang merah dalam kegiatan kemanusiaan belum diatur dalam suatu undang-undang. Untuk itu, masukan dari beberapa narasumber ini sangat diperlukan dalam rangka penyempurnaan draft RUU yang sedang dipersiapkan Badan Legislasi.

Anna menambahkan, secara garis besar, RUU Palang Merah ini bertujuan untuk meratifikasi, akses atau pengaturan mengenai perlindungan kemanusiaan dalam masa perang maupun masa damai sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan.

RUU ini juga mengatur mengenai gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk mencapai kegiatan-kegi-

atan kepalangmerahan yang memiliki misi kemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diakui gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

Selain itu, juga mengatur mengenai lambang serta penggunaan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit

darurat baik di dalam negeri atau internasional.

Jusuf Kalla mengatakan, setiap negara sesuai dengan Konvensi Jenewa hanya boleh memakai satu lambang, tidak boleh memakai kedua-duanya. Karena mempunyai konsekuensi yang sangat fatal dalam keadaan perang.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (tengah) didampingi dua Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah (kiri) dan Dimiyati Natakusumah (kanan) saat membuka rapat Baleg RUU Lambang Palang Merah

Merah.

Dalam memberikan masukannya Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengatakan, lambang palang merah sebagai tanda pengenalan dan tanda pelindung mempunyai suatu tatanan konsekuensi yang sangat luas karena menyangkut hubungan dengan internasional, menyangkut keselamatan dan menyangkut upaya-upaya bersama untuk mengatasi masalah.

Palang Merah Indonesia sangat concern terbitnya UU ini yang tujuannya untuk memberikan perlindungan dan apabila terjadi dalam keadaan

Apabila Indonesia memakai palang merah sebagai lambang kepalangmerahan, maka semua tentara Indonesia yang pada saat perang memakai tanda palang merah, dia tidak boleh menembak dan ditembak.

Sementara Kepala BNPB Syamsul Ma'arif mengatakan dia setuju lambang itu cukup satu saja supaya tidak bingung. Dan dia berpendapat perlu adanya simbol yang dapat disepakati secara internasional.

Namun yang perlu menjadi pemikiran, bagaimana agar lambang Palang Merah itu tidak disalahgunakan. Di sini

perlu dipikirkan agar setiap orang tidak dengan mudahnya diberikan lambang tersebut. Misalnya seperti jaket berlambang palang merah dan sebagainya.

Kepala Biro Hukum Basarnas Agung Prasetyo dalam memberikan masukkannya mengatakan, pada prinsipnya Basarnas mendukung terhadap isi dan substansi yang diatur dalam naskah akademis dan RUU Lambang Palang Merah ini karena telah sejalan dengan tugas dan fungsi Basarnas dalam melaksanakan operasi SAR terhadap musibah dan/atau bencana.

Basarnas memberikan beberapa catatan yang perlu ditambahkan dalam RUU Lambang palang Merah ini yaitu

dalam Bab 1 Ketentuan Umum perlu didefinisikan juga tentang musibah karena definisi musibah dan bencana sangat berbeda.

Definisi bencana yang sudah ada dalam RUU ini mengadopsi dari UU No. 24/2007 tentang penanggulangan Bencana. Definisi tersebut belum mencakup kejadian-kejadian yang terjadi akibat dari transportasi laut dan udara yang dikategorikan sebagai musibah.

Untuk itu, katanya, perlu didefinisikan musibah pelayaran dan/atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan/atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan manusia.

Agung mengatakan, sebaiknya istilah bencana diganti dengan musibah dan/atau bencana. Kalau hanya bencana maka akan mempersempit wilayah tugas dari PMI itu sendiri. Karena pada kenyataannya PMI juga turut serta dalam membantu tugas SAR pada musibah baik itu penerbangan maupun pelayaran. Sebagai contoh musibah yang baru saja terjadi kecelakaan Sukoi Super Jet 100 yang terjadi di Gunung Salak.

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (1) perlu dicantumkan juga organisasi pemerintah/instansi pemerintah sebagai salah satu organisasi yang dapat bekerjasama dengan PMI. (tt) foto: wy/parle

Ketua DPR Sambut Baik Kesepakatan Damai Keluarga Keraton Surakarta

Ketua DPR RI Marzuki Alie menyambut baik kesepakatan damai yang dilakukan oleh kalangan internal keluarga Keraton Surakarta demi terciptanya serta terpeliharanya Keraton Surakarta.



Ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah) saat menerima keluarga Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Haryo Tedjowulan dan Kanjeng Gusti Panembahan Ngabehi

“Saya orang yang sangat berbagia, karena dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini diharapkan mampu menjaga kebersamaan dan menyatukan perbedaan yang terjadi di dalam keluarga Kesunanan Surakarta, dan bersatu bersamasama dalam membangun keraton

Solo”Kata Marzuki Alie Saat menerima keluarga Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Haryo Tedjowulan dan Kanjeng Gusti Panembahan Ngabehi di Ruang Pimpinan, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5).

Ia menambahkan, sebelumnya kesepakatan ini terwujud, ia pernah

berusaha menyakinkan kedua belah pihak terkait, melalui komunikasi dengan dua keluarga, “Pada mulanya mereka agak marah, mereka bilang kenapa saya ikut campur urusan keraton, saya jawab, saya tidak akan ikut campur tangan tentang siapa yang akan menjadi raja, yang saya inginkan hanyalah bagaimana keraton ini bisa terpelihara dan terlestarikan,”jelas Marzuki.

Lebih lanjut ia menerangkan, bahwa hal ini, adalah perkembangan yang sangat positif bagi kita semua, karena tentunya dari sisi sejarah (Keraton Surakarta-red) seharusnya dapat dijaga dan dilestarikan baik secara fisik dan non fisik.

Dalam pertemuan tersebut, Marzuki Alie, berkesempatan menjadi saksi kesepakatan damai tersebut dengan menandatangani akta perdamaian. Sebelumnya, Perseteruan dua raja Keraton Kasunanan Surakarta yang sudah berlangsung sekitar delapan tahun berakhir dengan terciptanya kesepakatan damai diantara mereka berdua.(nt) foto:hd/parle

RUU Pemda Berikan Kepastian Pemda dalam Otonomi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah mengisyaratkan munculnya wacana baru untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Pemerintahan Daerah Budiman Sudjatmiko, saat memimpin Kunjungan Kerja di provinsi Bali, guna mendapatkan masukan dari Pemda Provinsi Bali, Pemda Kabupaten Badung, dan Universitas Udayana, Selasa (22/5).

Menurut Budiman, Ada beberapa perubahan yang ditawarkan dalam RUU ini bersifat fundamental, disamping ada pula yang bersifat peraturan lebih lanjut untuk menciptakan kejelasan dan ketegasan khususnya di tatanan pelaksanaan nantinya.

Secara substansi telah teridentifikasi 22 isu strategis yaitu Pembentukan Daerah Otonom, Pembagian Urusan Pemerintahan, Daerah berciri kepulauan, Pemilihan Kepala Daerah, Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Musyawarah Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, Aparatur Daerah, Per-



Wakil Ketua Pansus RUU Pemda, Budiman Sudjatmiko

aturan Daerah, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Kawasan Perkotaan, Kawasan Khusus, Kerjasama Antar Daerah, Desa, Pembimbingan dan Pengawasan Daerah, Tindakan Hukum terhadap Aparatur Daerah, Inovasi Daerah, dan DPOD.

Khusus untuk isu Pilkada dan Isu Desa, RUU Pemda hanya memuat pengaturan secara umum yang merupakan pengantar, "Pengaturan lebih lanjut secara rinci akan diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada dan Undang-Undang tentang Desa," papar Budiman Sudjatmiko. (as) foto:parle

DPR dan Pemerintah Miliki Pandangan Sama Tentang Calon Anggota DKPP

Terkait dengan mekanisme pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana amanat UU No.15 Tahun 2011, Komisi II DPR bersama Pemerintah, KPU dan Bawaslu memiliki pandangan yang sama dalam mengusulkan 7 (tujuh) calon anggota DKPP sesuai mekanisme kerja masing-masing lembaga.

Demikian isi salah kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa, saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi, KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/5)

Ketujuh calon anggota DKPP itu terdiri dari, 1 (satu) orang unsur KPU, 1 (satu) orang unsure Bawaslu, 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang diusulkan pemerintah dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang diusulkan oleh DPR.

Selain itu, dalam kesimpulan lainnya, Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu untuk menyerahkan usulan tertulis terkait struktur organisasi, mekanisme dan tata kerja kesekretariatan KPU dan Bawaslu untuk dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, berkenaan dengan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012, khususnya Pemilukada DKI Jakarta, Komisi II DPR, Pemerintah, KPU dan

Bawaslu akan menjadikannya barometer pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 dengan langkah melakukan verifikasi dan validasi pemuktakhiran data pemilih.

Kemudian, terhadap anggaran KPU dan anggaran Bawaslu, Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu untuk berkiriman surat kembali kepada Komisi II DPR disertai dengan rincian pengalokasian anggaran untuk Tahun 2012.(nt) foto: parle

Surahman Hidayat Akan Gantikan HNW Jabat Ketua BKSAP

Ketua BKSAP DPR M. Hidayat Nur Wahid ditarik Fraksi PKS dari jabatan sebagai Ketua, Penarikan ini terkait dengan majunya yang bersangkutan dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.



Ketua BKSAP DPR M. Hidayat Nur Wahid



Surahman Hidayat (F-PKS)

Selanjutnya, Fraksi PKS akan mengusulkan Surahman Hidayat (Dapil Jawa Barat) untuk menggantikan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua BKSAP.

“Penarikan ini agar Pak Hidayat bisa berkonsentrasi sebagai Calon Kepala Daerah DKI Jakarta dan kerjanya BKSAP tidak terbengkalai dengan rangkap jabatan, sehingga kita ajukan Ustadz Surrahman sebagai Ketua BKSAP menggantikan Pak Hidayat,” jelas Ketua Fraksi Mustafa Kamal dalam siaran persnya kepada Parle baru-baru ini.

Menurut Kamal, Fraksi PKS sebenarnya cukup berat menarik Hidayat dari posisi BKSAP karena prestasi yang sudah ditorehkan olehnya yang mampu membawa DPR RI menjadi lembaga

terhormat di regional Asia. Dibawah kepemimpinan Hidayat, Indonesia dipercaya sebagai Parlemen Organisasi Negara Islam (PUIC) periode 2010-2014. Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi perwakilan parlemen Islam untuk mengungkapkan kesuksesan Islam di Indonesia yang moderat, toleran dan menghargai kemajemukan.

“Pak Hidayat sudah menjadi tokoh internasional dan mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia melalui diplomasi parlemen. Ini menjadi kebanggaan bagi kami di PKS dan umumnya juga seluruh bangsa Indonesia,” tegasnya.

Meski demikian dengan pertimbangan tetap menjaga amanah, maka FPKS memutuskan untuk terus men-

jalankan kepercayaan sebagai Ketua BKSAP dan mengajukan nama baru yakni Surahman Hidayat. Sebelumnya, Surahman sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX (Bidang Perbankan dan Keuangan) serta Wakil Ketua Komisi VIII (Bidang Sosial dan Agama). Di internal PKS, Surahman menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS.

“Kami mengajukan Ustadz Surrahman dengan pertimbangan kapasitas dan pengalaman beliau di dalam dan luar negeri. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki jaringan internasional Islam yang luas. Sehingga Parlemen Indonesia di dunia Internasional bisa menorehkan lebih banyak prestasi lagi,” jelasnya. (si) foto:dok/parle

Kongres dan Pemerintah AS Tolak Kemerdekaan Papua

Kunjungan Dubes Amerika Serikat Scot Marciel merupakan penegasan apresiasi Pemerintah dan Kongres AS pasca kunjungan diplomatik Kaukus Indonesia-AS DPR RI ke Washington D.C, beberapa waktu lalu.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat menerima Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel dalam kunjungan kehormatannya di Gedung DPR RI, Rabu, (23/5).

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, bahwa salah satu raihan yang menggembirakan dalam kunjungan Kaukus ke Washington DC adalah komitmen tegas anggota Kongres AS dan Pemerintah AS atas kesatuan wilayah Indonesia dan penegasan pengakuan bahwa Papua adalah bagian integral dari wilayah RI.

Hal senada disampaikan oleh Dubes Scot Marciel, dia menyatakan, kunjungan delegasi DPR RI ke Washington adalah salah satu kunjungan yang sangat produktif sepanjang sejarah hubungan antara parlemen Indonesia dan Kongres AS.

Kaukus Indonesia-AS DPR RI yang didirikan pada 28 Maret 2012 dan beranggotakan 40 orang anggota telah melakukan kunjungan ke Washington DC pada 23-29 April 2012 atas undangan Kongres AS. Dalam kunjungan tersebut, delegasi Kaukus DPR RI-AS dipimpin oleh Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Kaukus sekaligus Ketua Delegasi dengan anggota Teguh Juwarno (FPAN), Bobby Rizaldi (FPG), Didi Irawadi Syamsudin (FPD), Eva Kusuma Sundari (FPDIP), Ahmad Yani (FPPP), Edhy Prabowo (Gerindra), Akbar Faizal (Hanura) dan Peggy Patrisia Pattipi (FKB).

Dengan total 15 agenda pertemuan selama 5 hari di Washington D.C., delegasi Kaukus Indonesia-AS DPR RI melakukan pertemuan dengan Senator Jim Webb (Ketua Komisi Luar Negeri Senat), David Dreier (Ketua House Democracy Partnership), Jim McDermott (Ketua Kaukus Indonesia di Kongres AS), Maria Otero (Wakil Menlu AS), Kurt Campbell (Asisten Menlu Urusan Asia Pasifik), Daniel Russel

(Asisten Khusus Presiden Obama), Collin Willet (pejabat senior Dewan Keamanan Nasional), Dubes AS untuk APEC, Dubes AS untuk Myanmar, Direktur Congressional Research Service, Direktur USAID Wilayah Asia, USINDO dan Perwakilan U.S. - ASEAN Business Council serta melakukan kunjungan ke markas Voice of America. Dalam pertemuan dengan pejabat-pejabat penting AS ini, delegasi Kaukus didampingi oleh Dubes Indonesia untuk AS, Dino Patti Jalal.

Sepanjang kunjungan tersebut, delegasi Kaukus menyampaikan penjelasan menyeluruh tentang perkembangan demokratisasi yang hebat di Indonesia. "Indonesia kini hadir sebagai ujung terdepan negara yang paling demokratis di jagad ini. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, Indonesia mampu menyelaraskan demokrasi secara harmonis dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal,"kata Priyo Budi Santoso saat berpidato di USINDO belum lama ini.

Saat bertemu dengan Congressman Eni Faleomavaega yang dikenal sangat vokal tentang Indonesia khususnya masalah Papua, delegasi Parlemen Indonesia Akbar Faisal dan Peggy Pattipi menyampaikan berbagai aspek kemajuan dalam penanganan masalah Papua dengan diberlakukannya UU Otonom Khusus Papua. Delegasi Kaukus juga menegaskan perlunya Pemerintah RI dan Freeport membahas kembali dan mengkaji ulang kontrak karya atas dasar keadilan dan kebersamaan, bukan semangnat penghisapan sebagaimana sering teropinikan. Congressman Eni Faleomavaega mempunyai pandangan yang sama tentang Papua. Bahkan ia mene-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) saat menerima Duta Besar Amerika Scot Marciel

gaskan komitmennya untuk tidak lagi mendukung kemerdekaan Papua dan menghormati kesatuan wilayah Indonesia.

Dengan model diplomasi yang khas parlemen, delegasi Kaukus berhasil mendorong upaya kerjasama yang lebih erat dengan Kongres AS. Di dalam konteks kerjasama dengan House Democracy Partnership, Kaukus mendorong upaya peningkatan kemitraan dalam hal *capacity building* keparlemen antara lain dalam hal pertukaran staf ahli, join website, join riset, dan partisipasi pada workshop-workshop keparlemen.

Delegasi Kaukus juga memantapkan kerjasama dengan mitranya di Kongres AS dimana kedua Kaukus berharap dapat segera menandatangani sebuah dokumen kemitraan yang secara jelas memformulasikan kerjasama kongkrit kedua Kaukus. Delegasi Kaukus secara komprehensif juga menyampaikan visi untuk merajut peta jalan terbentuknya Indonesia-U.S. Legislative Strategic Partnership sebagai bentuk sinerjitas dari U.S. - Indonesian Comprehensive Partnership yang telah terlebih dahulu ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono dan Presiden Obama pada 2010 di Jakarta. (parle) foto:parle



Ketua DPR Marzuki Alije didampingi Wakil Ketua Pramono Anung beserta Pimpinan BKSAP Hidayat Nurwahid dan Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Presiden Portugal Casavo Silva di ruang pertemuan Rabu (23/5) foto:HD



Enam anggota Parlemen Singapura dipimpin Ketuaanya Michael Palmer melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua DPR RI Marzuki Alije, di Hotel Mulia, Jakarta, 22 Mei 2012. foto:WY



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima kunjungagn kehormatan Duta Besar Amerika Serikat, Mr. Scott Marciel di ruang kerjanya, lantai 3 gedung nusantara III Senayan Jakarta, 23 Mei 2012. foto:WY



Kunjungan Pansus RUU tentang Pemda dipimpin wakil Ketua Pansus RUU Pemda Budiman Sudjatmiko di Provinsi Bali, 21-23 Mei 2012. foto:AS



Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemda dipimpin Wakil Ketua Pansus RUU Pemda Ibnu Munzir melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). 21-23 Mei 2012. foto: IW

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**